



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Taman pahlawan nomor 9 Purwakarta

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadlirat Allah SWT, berkat rahmat dan anugerah-Nya disertai kerjasama dan kebersamaan seluruh keluarga besar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dan fasilitasi dari pejabat berwenang, telah tersusun Rencana Kerja (RENJA) Dinsos P3A Kab Purwakarta Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja ini didasari ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinsos P3A Tahun 2024 ini memuat uraian program dan kegiatan Dinsos P3A dalam perubahan tahun 2024. Dokumen ini diharapkan dapat membawa peningkatan kinerja Dinsos P3A dan memberikan arah kebijakan yang jelas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta.

Harapan kami semoga Renja Dinsos P3A Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut untuk mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas mudah – mudahan kinerja Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kabupaten Purwakarta.

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA



H DIDI SUARDI, SH.M.Si

NIP. 19660525 198803 1008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang.....	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	7
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	28
BAB IV. PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang memuat rancangan, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, agar terwujudnya sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan dengan pembangunan daerah dan tersusunnya perencanaan program dan kegiatan secara baik yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2024

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta “ Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakulkarimah “

Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) turut berkembang baik secara kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya dan tidak hanya berbentuk permasalahan kesejahteraan sosial yang sifatnya konvensional juga munculnya permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan ke depan yang makin kompleks dengan permasalahan yang semakin berkembang khususnya di Jawa Barat, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya menyusun Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang lebih terencana, terkoordinasi, sinergis, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabuapten Purwakarta Tahun 2018 - 2024

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 disusun berdasarkan;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 40 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Laksana Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 Nomor 66);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 Nomor 47);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2024 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024.

Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Dinas sampai dengan triwulan dua tahun 2024.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan RKPD; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

1.3 Sistematika Dokumen Renja Kerja

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kekentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini menguraikan mengenai rencana kerja dan pendanaan yang akan dijadikan pedoman pembuatan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V PENUTUP

Pada Bab penutup menguraikan mengenai proses akhir penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang akan dijadikan pedoman pembuatan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024. Dalam prosesnya sendiri pastilah mengalami berbagai kondisi yang tidak sesuai dengan yang telah di prediksi. Kondisi ini bisa lebih baik atau lebih buruk, sehingga untuk meningkatkan kinerja dan perencanaan kerja yang lebih baik di tahun berikutnya diperlukannya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.528.600	97.982.400	61	-	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	-	Persen
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.678.900	4.898.500	33	-	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	-	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.734.100	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.697.600	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.412.000	43.133.900	56	100	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Laporan
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.006.000	49.950.000	81	50	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2	Laporan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.290.053.619	2.819.752.620	45	-	Meningkatnya Kinerja ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	-	Persen
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.280.434.019	2.810.914.020	45	57	Meningkatnya Kinerja ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	-	Orang/bulan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.619.600	8.838.600	92	100	Meningkatnya Kinerja ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.508.400	2.983.400	85	-	Meningkatnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	-	Persen
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.508.400	2.983.400	85	50	Meningkatnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	2	Laporan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.429.900	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	100	-	Persen
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.245.000	-	-	-	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	-	Paket
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	-	Orang
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.184.900	-	-	-	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	-	Orang

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.744.137	114.588.534	46	-	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100	-	Persen
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.997.000	6.249.000	25	25	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	-	Paket
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.685.000	15.330.000	50	50	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	-	Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.066.137	49.667.534	50	50	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	-	Paket
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	32.435.000	93	90	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	-	Paket
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	6.027.000	24	-	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	-	Laporan
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.450.000	4.880.000	17	20	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	-	Laporan
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.546.000	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	-	Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.373.000	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	Persen

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.657.000	-	-	-	Meningkatnya kualitas Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	-	Unit
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.716.000	-	-	-	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	-	Unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.178.076	333.681.911	46	-	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	100	-	Persen
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.999.060	46.367.499	38	50	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	-	Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	598.179.016	287.314.412	48	50	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	-	Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.563.700	52.204.500	13	-	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	Persen
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	39.029.500	56	50	Meningkatnya kualitas Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	-	Unit

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	7.500.000	19	25	Meningkatnya kualitas Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	-	Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	265.763.700	5.675.000	2	25	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1	Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.800.000	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	57	-	Unit
9	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	245.880.800	28.060.800	11	-	Persentase Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100	-	Persen
-	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	88.380.800	21.660.800	25	-	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	192	-	Orang
-	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	62.500.000	6.400.000	10	-	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17	-	Orang

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000	-	-	-	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	-	Keluarga
-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	-	-	-	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	38		Lembaga
10	Pemulangan Warga Negara Mirgan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	-	-	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	Persen
-	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	-	-	-	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Orang
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	567.283.000	198.996.000	35	-	Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	-	Persen

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Penyediaan Permakanan	40.000.000	-	-	-	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40	-	Orang
-	Penyediaan Sandang	40.300.000	-	-	-	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30	-	Orang
-	Penyediaan Alat Bantu	187.813.000	140.603.000	75	-	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	29	-	Orang
-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000	370.000	1	7	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30	2	Orang
-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	32.500.000	38.568.000	119	-	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	-	Orang

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	51.018.000	-	-	-	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	-	Orang
-	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10.935.000	-	-	5	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20	1	Orang
-	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.697.500	-	-	10	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30	3	Orang
-	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	38.380.000	2.000.000	5	24	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	6	Orang

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Pemberian Layanan Kedaruratan	60.000.000	12.014.000	20	27	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	8	Orang
-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	33.639.500	-	-	7	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30	2	Orang
-	Pemberian Layanan Rujukan	40.000.000	5.441.000	14	10	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	2	Orang
12	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	48.000.000	5.304.000	11	-	Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100	-	Persen
-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	-	-	-	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Orang
-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	48.000.000	5.304.000	11	-	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	18	-	Dokumen

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
13	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	39.071.500	-	-	-		Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	Persen
-	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	22.529.500	-	-	-		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Orang
-	Rujukan Anak-Anak Terlantar	7.002.000	-	-	-		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Orang
-	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	9.540.000	-	-	-		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Orang
14	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.500.233.000	584.373.000	39	100	Jumlah Data Fakir Miskin Yang Dimutakhirkan dan Difasilitasi	Jumlah data fakir miskin yang dimutakhirkan dan difasilitasi	1	1	Dokumen
-	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	249.250.000	115.580.000	46	48	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	34.000	16.455	Orang
-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	94.115.000	57.254.000	61	106	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten / kota	103.538	110.048	Keluarga
-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.123.868.000	382.044.000	34	104	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten / kota	30.701	31.905	Keluarga

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	33.000.000	29.495.000	89	100	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapatkkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten / kota	20	20	Orang
15	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	141.750.500	18.258.000	13	100	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana	100	100	Persen
-	Penyediaan Makanan	56.500.000	10.308.000	18	848	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	848	Orang
-	Penyediaan Sandang	49.955.000	840.000	2	1.211	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70	848	Orang
-	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	14.955.500	840.000	6	100	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Orang

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.340.000	6.270.000	31	103	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	31	Orang
16	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	62.231.000	23.329.000	37	100	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Bencana	100	100	Persen
-	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	26.570.000	14.529.000	55	100	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Kampung
-	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	35.661.000	8.800.000	25	100	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	18	18	Orang
17	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	193.226.619	15.094.000	8	#DIV/0!	Meningkatnya Kualitas Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Persen

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39.999.000	15.094.000	38	40	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Dokumen
-	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	153.227.619	-	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Makam
18	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	135.000.500	25.529.000	19	100	Terfasilitasinya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Terfasilitasinya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	25	25	Perangkat Daerah
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	4.200.000	9	100	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	Dokumen
-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	39.999.800	21.329.000	53	100	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	Perangkat Daerah

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50.000.700	-	-	100	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	Perangkat Daerah
19	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	35.100.000	47	100	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen
-	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	75.000.000	35.100.000	47	100	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	-	-	100	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen
-	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	-	-	100	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	Dokumen
21	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	190.200.000	79.500.000	42	100	Terfasilitasinya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12	12	Dokumen
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	-	-	100	Terfasilitasinya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen
-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	178.200.000	79.500.000	45	100	Terfasilitasinya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	Perangkat Daerah

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
22	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	86.768.000	15.000.000	17	100	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	Layanan
-	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	81.750.000	15.000.000	18	100	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30	30	Orang
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.018.000	-	-	100	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	Layanan
23	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	-	-	100	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	100	100	Persen

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	-	-	100	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen
24	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	19.675.000	28	100	Tercapainya Kesetaraan Gender di Kabupaten Purwakarta	Tercapainya Kesetaraan Gender di Kabupaten Purwakarta	100	100	KK Binaan
-	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	19.675.000	28	100	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	5	Layanan
25	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	-	-	100	Data Gender Anak	Data Gender Anak	1	1	Dokumen
-	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	-	-	100	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	Dokumen
26	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	52.000.000	20.394.000	39	100	Persentase jumlah Lembaga PHA yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Persentase jumlah Lembaga PHA yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	100	100	Persen

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	52.000.000	20.394.000	39	100	Persentase jumlah Lembaga PHA yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Medai dan Dunia Usaha	50	50	Organisasi
27	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	68.750.000	-	-	100	Persentase Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	98	98	Persen
-	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	68.750.000	-	-	100	Persentase Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup kewenangan kabupaten/kota	30	30	Orang
TOTAL		11.631.774.351	4.489.806.165	39	69					

Evaluasi

Melihat dari tabel laporan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, dari pagu murni anggaran tahun 2024 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta senilai Rp. 11.431.774.351,- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) baru terdapat realisasi anggaran sebesar Rp.4.489.806.165,- (Empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus enam puluh lima rupiah), masih terdapat anggaran sebesar Rp.7.141.968.186,- (tujuh miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) atau dalam prosentase 38,60%. Hal ini masih tertinggal dari standar capaian triwulan 2 yang seharusnya sudah mencapai 50% capaian dari jumlah pagu murni tahun 2024.

Evaluasi hasil capaian urusan pemerintahan urusan sosial, dari target kinerja dan anggaran tahun 2024 adalah Rp.10.814.055.851,- sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 terdapat realisasi Rp.3.736.432.044, dengan capaian kinerja 26,35%, dengan capaian tersebut, urusan sosial termasuk dalam predikat kinerja “Sangat rendah”.

Evaluasi hasil capaian urusan pemerintahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari target kinerja dan anggaran tahun 2024 adalah Rp.817.718.500,- sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 terdapat realisasi Rp.139.379.000, dengan capaian kinerja 22,66%, dengan capaian tersebut, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk dalam predikat kinerja “Sangat rendah”

Permasalahan

Permasalahan pelaksanaan program pada triwulan II tahun 2024 antara lain:

- Adanya kegiatan dan subkegiatan yang output dan target belum berkesesuaian;
- Masih terdapat pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang kurang mendongkrak dalam pencapaian target kinerja indikator program;
- Terbatasnya sumber daya manusia pelaksana kegiatan/subkegiatan sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan;

- Adanya kebijakan nasional yang harus ditindaklanjuti sehingga berdampak pada penundaan pelaksanaan kegiatan/subkegiatan;
- Sarana Prasarana kantor kurang memadai sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, rekomendasi yang disampaikan adalah:

- Penyesuaian pagu anggaran pada program, kegiatan dan subkegiatan yang berkenaan;
- Mengevaluasi kembali output kegiatan/subkegiatan yang kurang sesuai dengan capaian target kinerjanya;
- Peningkatan kapasitas aparatur teknis pelaksana kegiatan/subkegiatan;
- Penyesuaian kembali pelaksanaan kegiatan/subkegiatan agar selaras dengan kebijakan nasional;
- Memprioritaskan pada pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan guna menunjang dalam pelaksanaan kegiatan dinas;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dituangkan dalam Bab ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar; Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan sosial, dan satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan disajikan dalam tabel di bawah ini:

RENCANA PENDANAAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.915.939.732	7.946.550.499	30.610.767
1	6	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.678.600	152.528.600	25.850.000
1	06	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.678.900	14.678.900	- 50.000.000
1	6	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.734.100	4.734.100	-
1	06	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.697.600	3.697.600	-
1	06	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.512.000	73.412.000	31.900.000
1	06	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.056.000	56.006.000	43.950.000
1	6	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.290.053.619	6.268.053.619	- 22.000.000
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DANA PERIMBANGAN	6.280.434.019	6.258.434.019	- 22.000.000
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.619.600	9.619.600	-
1	6	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.508.400	3.508.400	-
1	06	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.508.400	3.508.400	-
1	6	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.429.900	56.429.900	- 50.000.000
1	06	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.245.000	50.245.000	-
1	06	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	-	- 50.000.000
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.184.900	6.184.900	-
1	6	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249.744.137	252.468.904	2.724.767
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.997.000	24.997.000	-
1	06	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.685.000	30.685.000	-
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.066.137	100.390.904	324.767
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000	35.000.000	-
1	06	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000	25.000.000	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.450.000	30.850.000	2.400.000
1	06	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.546.000	5.546.000	-
1	6	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.373.000	148.459.000	74.086.000
	06	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	89.540.000	89.540.000
1	06	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.657.000	37.395.000	- 2.262.000
1	06	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.716.000	21.524.000	- 13.192.000
1	6	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	720.178.076	720.178.076	-
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.999.060	121.999.060	-
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	598.179.016	598.179.016	-
1	6	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	344.974.000	344.924.000	- 50.000
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.000.000	70.000.000	-
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000	40.000.000	-
1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.174.000	200.124.000	- 50.000
1	06	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.800.000	34.800.000	-
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	225.000.000	245.880.800	20.880.800
1	6	2	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	225.000.000	245.880.800	20.880.800
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.500.000	88.380.800	20.880.800
1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62.500.000	62.500.000	-
1	06	02	2,03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.000.000	55.000.000	-
1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000	40.000.000	-
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TIDAK KEKERASAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.502.000	-	- 9.502.000
1	6	3	2,01		Pemulangan Warga Negara Mirgan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.502.000	-	- 9.502.000
1	06	03	2,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.502.000	-	- 9.502.000
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	577.851.500	583.289.000	5.437.500

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
1	6	4	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	489.907.500	547.889.000	57.981.500
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000	40.000.000	-
1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.300.000	40.300.000	-
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.210.000	187.813.000	140.603.000
1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000	16.917.000	- 13.083.000
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.500.000	32.500.000	-
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.500.000	51.018.000	13.518.000
1	06	04	2,01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	10.935.000	- 9.065.000
1	06	04	2,01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.597.500	2.697.500	- 41.900.000
1	06	04	2,01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.800.000	38.380.000	- 9.420.000
1	06	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000	60.000.000	-
1	06	04	2,01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	33.639.500	- 16.360.500
1	06	04	2,01	12	Pemberian Layanan Rujukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000	33.689.000	- 6.311.000
1	6	4	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.944.000	35.400.000	- 52.544.000
1	06	04	2,02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.944.000	-	- 39.944.000
1	06	04	2,02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.000.000	35.400.000	- 12.600.000
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.539.304.500	1.500.233.000	- 39.071.500
1	6	5	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.071.500	-	- 39.071.500
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.529.500	-	- 22.529.500
1	06	05	2,01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.002.000	-	- 7.002.000
1	06	05	2,01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.540.000	-	- 9.540.000
1	6	5	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.233.000	1.500.233.000	-
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249.250.000	249.250.000	-
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	94.115.000	94.115.000	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.123.868.000	1.123.868.000	-
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.000.000	33.000.000	-
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	203.981.500	203.981.500	-
1	6	6	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	141.750.500	141.750.500	-
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.500.000	56.500.000	-
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.955.000	49.955.000	-
1	06	06	2,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.955.500	14.955.500	-
1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.340.000	20.340.000	-
1	6	6	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62.231.000	62.231.000	-
1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.570.000	26.570.000	-
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.661.000	35.661.000	-
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	193.226.619	143.811.750	- 49.414.869
1	6	7	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	193.226.619	143.811.750	- 49.414.869
1	06	07	2,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.999.000	39.999.000	-
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.227.619	103.812.750	- 49.414.869
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.000.500	260.000.500	-
2	8	2	2,01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	135.000.500	135.000.500	-
2	08	02	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.000.000	45.000.000	-
2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.999.800	39.999.800	-
2	08	02	2,01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.700	50.000.700	-
2	8	2	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000	75.000.000	-
2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000	75.000.000	-
2	8	2	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	50.000.000	-
2	08	02	2,03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	50.000.000	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	226.218.000	225.188.000	- 1.030.000
2	8	3	2,01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178.200.000	181.200.000	3.000.000
2	08	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.000.000	12.000.000	-
2	08	03	2,01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	166.200.000	169.200.000	3.000.000
2	8	3	2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.018.000	43.988.000	- 4.030.000
2	08	03	2,02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.000.000	40.550.000	- 2.450.000
2	08	03	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.018.000	3.438.000	- 1.580.000
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.000.000	117.000.000	- 3.000.000
2	8	4	2,01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	47.000.000	- 3.000.000
2	08	04	2,01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	47.000.000	- 3.000.000
2	8	4	2,03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.000.000	70.000.000	-
2	08	04	2,03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.000.000	70.000.000	-
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000	8.596.000	- 31.404.000
2	8	5	2,01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000	8.596.000	- 31.404.000
2	08	05	2,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000	8.596.000	- 31.404.000
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.750.000	117.530.000	- 3.220.000
2	8	6	2,01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.000.000	52.000.000	-
2	08	06	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.000.000	52.000.000	-
2	8	6	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	68.750.000	65.530.000	- 3.220.000
2	08	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	68.750.000	65.530.000	- 3.220.000
TOTAL							11.431.774.351	11.352.061.049	- 79.713.302

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Purwakarta tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencan Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 dan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024, yang diharapkan memberikan dampak pembangunan yang optimal.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, penyusunan Rencana Kerja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, urusan sosial dan urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinsos P3A kabupaten Purwakarta tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

Purwakarta, 5 Agustus 2024
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA



H DIDI SUARDI, SH.M.Si

NIP. 19660525 198803 1008